

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Rekonseptualisasi Benda Hukum adat guna eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara yaitu konsep benda dalam hukum adat pada awalnya membagi benda ke dalam 2 bagian yaitu benda tanah dan benda bukan tanah. Pada saat itu mineral dan batubara termasuk kedalam benda tanah. Setelah dilakukan rekonseptualisasi dengan melakukan redefinisi tanah dan perluasan asas pemisahan horizontal, maka pembagian benda dibagi menjadi 3 yaitu benda tanah, benda bukan tanah dan benda dalam tanah. Benda mineral dan batubara setelah direkonseptualisasi termasuk ke dalam benda dalam tanah.
2. Rekonseptualisasi hak kebendaan dalam hukum adat guna pengaturan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara terjadi akibat adanya perluasan asas pemisahan horizontal dan rekonseptualisasi benda dalam hukum adat. Berkaitan dengan adanya kegiatan eksplorasi tambang mineral dan batubara, maka dalam kegiatan tersebut yang akan menjadi objek adalah rekonseptualisasi adalah bahwa dalam hukum adat berkaitan dengan hak menikmati dari hasil dari tanah, akan tetapi setelah direkonseptualisasi hak eksplorasi yang berasal dari hak menikmati

menghasilkan berupa data atau informasi hasil dari kegiatan eksplorasi atas tanah yang dikuasai. Selain itu berkaitan dengan hak eksploitasi. Dalam kegiatan ini maka yang terjadi adalah penguasaan atas data dan informasi berkaitan dengan benda yang beradanya dihasilkan adalah mineral dan batubara yang pada awalnya termasuk benda tanah, setelah di rekonseptualisasi mineral dan batubara termasuk kedalam benda dalam tanah yang bentuk hak kebendaannya berupa hak milik .

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan pembaharuan konsep benda dalam hukum adat dalam kegiatan ekplorasi tambang mineral dan batu bara terutama sehubungan dengan konsep hak kebendaan dalam kegiatan eksplorasi yang menghasilkan data dan informasi dikaitkan dengan hak intelektual agar para pelaku usaha eksplorasi dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya.
2. Disarankan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan pembaharuan konsep benda dalam hukum adat berkaitan dengan kegiatan ekplorasi tambang mineral dan batu bara dalam kaitannya dengan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi tambang tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

terutama pelaku usaha atas ketentuan tentang eksplorasi tambang mineral dan batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU-BUKU

- A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia* dalam “Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” disunting oleh: Oetojo Oesman & Alfian, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- A. P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung 1991.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Amirudin “et.al” *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Andrian Sutendi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Kovergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia*, jurnal Perspektif Vol XXI No 1 Tahun 2016.
- Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, (Analisis Yuridis unsur-unsunya)*, UI-Press, Jakarta, 1995.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Boudewijn Bouckaert, *Property law and economics*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, 2010.
- Bryan A. Garner, , *Black’s Law Dictionary, seventh edition, USA : West Publishing, Minnesota*, 1999.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, cet 4 Refika Aditama, Bandung, 2016

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- C.S.T Kasnsil, *Hukum Perdata I Termasuk asas-asas Hukum Perdata*, Pradinya Paramita, Jakarta, 1991.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun mendatang*, jakarta, 1995.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982.
- E.Sumaryono , *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, yogyakarta, 1993.
- Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang Memberi Jaminan) Jilid I*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, 2012.
- George Whitercross Paton, *Jurisprudence*, diterjemahkan oleh G. Soedarsono, A.Har joto dan Ibnu Santoro, Yayasan BP Gadjah Mada, yogyakarta (tanpa tahun).
- H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda* diterjemahkan oleh: Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1990.
- H.M Fauzan , *Kaidah Peneluan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Handi Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.

- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persadam, 2009.
- Iman Sudiat, *Hukum Aday Sketsa Asas*, Liberty, Jogjakarta, 1981.
- Ismail Alrip, Farida Patittingi, Faisal Abdullah, *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- J. Satrio, *Pelepasan Hak Pembebasan Hutang dan merelakan Hak (Rechtsverwerking)*, Raja Grafindo Jakarta, 2016.
- John W Salmon, *Jurispruden or The Theory of The Law*, Stevens &Haynes, London, 1902.
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Krenenburg, R dan B Sabarudin, *Ilmu Negara Umum*, cet 11, Padya Pramita, 1989.
- Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo Jakarta, 2004,
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* diterjemahkan oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum apakah hukum itu?*, Remaja Rosdakarya, Bnadung, 1993.
- Lili Rasjidi, *Kata Pengantar dalam Romli Atmasasmita Teori Hukum Integratif Rekontruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- M. Marwan dan Jimmly P, *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya, 2009.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI*, Jakarta, 1959.
- Maria S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, cet 1, setara Press, Malang, 2013.
- Nicolson Y Cano Abogados, *Basic of Mining law in Argentina*, Globalaw, Brussel, belgia, 2016.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Reflika Aditama, Bandung, 2004.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rahmat Triyono, *Hak Menguasai Negara Dalam Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta 1995.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta, 1990.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Save M. dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*,: LKPN, Jakarta, 2000.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.
- SF Marbun et. al. , *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001,
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Sebuah Tawaran Kerangka Berpikir)*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet 15 PT Raja Grafindon Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006.
- Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, *Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*, Indonesian Mining Association (IMA), Jakarta, 1993.
- Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- Sujono dkk, *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengelolaan Emas di Indonesia*, Pusat Teknologi mineral dan Batubara, Bandung, 2004.
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Tody Sasmitha, Haryono Budhiawan, Sukayadi, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK*

No. 3/PUU-VIII/2010), Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.

Toto Tohir dan Ujang Charda, *Transformasi Hukum Perdata Indonesia dari Kodifikasi ke sektoral*, Fakultas Hukum Universitas Subang, Subang, 2014.

Trisadini Prasastina Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif Volume XVII No 1 Tahun 2012

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradta Paramita, Jakarta, 2004.

Victor Imanuel Williamsen Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol 9 No 3 Tahun 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT intermesa, Jakarta, 1981.

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Artikel Jurnal, Disertasi, Sumber lainnya

Abdulkadir Besar, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru* dalam Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional) No. 1 Tahun 1995, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman.

Arie S. Hutagalung, *Risalah Rapat Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan*, Senin, 19 September 2012.

Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalis*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V No 1 Juni 2015.

Awaloedin Djamin, *Pokok-pokok Uraian Tentang : Proses Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional* dalam “Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional)” No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Badan Statistik, *Statistik Pertambangan Non minyak dan Gas Bumi 2011-2015*.

- Debiana Dewi Sudrajat, *Menggali Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Bandung, 2017.
- Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta, 1995.
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun mendatang*, Jakarta, 1995.
- Handi Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.
- Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*, July 28, 2005.
- Johannes Gunawan, *Verifikasi Sejawat (Peers Verification) Dalam Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam “Jurnal Penelitian” Nomor 13 – Agustus 2002, Lembaga Penelitian Universitas Parahyangan.
- Maria S.W. Sumardjono, “*Redefinisi Hak atas Tanah: Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di Bawah Tanah dan Ruang Udara*”, dalam Seminar Nasional Hak Atas Tanah dalam Konteks Masa Kini dan yang akan Datang, Kerjasama BPN-Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 15 Oktober 1991.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 Juni 2012.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012.
- Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol 9 No 20 Tahun 2002, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ruslan Abdul Ghani, *Proses Perumusan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908-1945 (Pendekatan Historis-Empiris dan Teoritis-Analisis)* Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional.
- Soejono Koesoemo Sisworo, *Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia* dalam “Kumpulan Pidato

Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang” dihimpun oleh: Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996.

Suwoto, *kekuasaan Tanggung Jawab Presiden: suatu penelitian segi-segi teoritik dan Yuridik pertanggung jawaban kekuasaan*, disertasi, universitas airlangga, 1990.

Tody Sasmitha, Haryono Budhiawan, Sukayadi, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, Pusat Penelitian dan Pengabdiankepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.

C. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.